

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan umum adalah pernyataan hasil atau arah yang tidak perlu spesifik, namun dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan keputusan yang perlu diambil dalam penerapan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan umum pembangunan daerah adalah kebijakan yang memuat arah atau petunjuk, serta ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penentuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, kebijakan umum pembangunan daerah dirumuskan untuk menunjukkan korelasi antara sasaran pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung terhadap pencapaian sasaran dimaksud, dalam hal ini 3 Sektor penting di Kabupaten Bone Bolango yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, dan Sektor Infrastruktur wilayah.
2. Adapun hambatan Pemerintah Daerah kabupaten Bone Bolango yaitu berupa: (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun depan atau tahun berikutnya dilaksanakan ditahun berjalan, sehingga masih dalam perkiraan; dan (2) Asumsi harga masih berlaku ditahun sekarang sehingga tanggal harga dalam penyusunan APBD maupun pembuatan laporan pertanggung jawaban APBD ini mengikuti harga yang sekarang.

## **1.2 Saran**

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Bone Bolango dalam mengambil langkah kebijakan harus menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan APBD, jika tidak menerapkan prinsip transparansi maupun akuntabilitas ini masyarakat akan sulit percaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah Bone Bolango selain menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah juga harus menerapkan fungsi pengawasan dan peraturan perundang-undangan lebih jelas yang terkait dengan prinsip transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, karena fungsi pengawasan dan peraturan perundang-undangan yang terkait ini sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & H. Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiyono. 2013. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good, Governance". *Fiat Justitia Jurnal*. Volume 7, Nomor 1.
- CUI-ITB Departemen Teknik Planologi. 2014. "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian *Good Governance*". *Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Volume 15, Nomor 1.
- Fadhillah Dina. 2013. "Kebijakan Pemerintah". (<http://dinafadhillahs.blogspot.com/2013/04/kebijakan-pemerintah.html>, diakses Rabu, 29 Juli 2015).
- Huda Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media.
- HR Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jayanti Ika Puspita, dkk. 2014. "Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)". *Administrasi Publik*. Volume 2. Nomor 2.
- Kade Dwi Ratmini Sayu. 2014. "Pengaruh Kepuasan Penggunaan Software Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Pengguna Sistem Informasi". Bandung Lampung: Universitas Lampung.
- Kencana Syafie Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi. Bandung: RF. Rafika Aditama.
- M. Giroth Lexie. 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja (Publik Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja)*. Cetakan Pertama. Jatinangor: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Press.
- M. Giroth Lexie. 2004. *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia (Higher Education Pamong Praja, Global Governance and Open Society)*. Cetakan Pertama. Jatinangor: CV. Indra Prahasta.
- Muhi Ali Hanapiah. 2011. "Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Peraturan perundang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Purnama Rizki Jusuf. 2005. (Dalam Bukunya Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*). Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Rahman Nikmahastuti, dkk. 2014. "Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado Dan Kota Bitung Tahun 2008-2012)". *Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14. Nomor 3. 2014.

- Rahmania Aini. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Pemerintah Kabupaten Jepara". Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kali Jaga.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang tentang Otonomi Daerah 2004-2011, Nomor 32 & 33 tahun 2004*. Cetakan Pertama. Surabaya: AP Anfaka Perdana.
- Soleh Chabib & Rochmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Cetakan Pertama. Bandung : FM Fokus Media.
- Tunggal Alfines, dkk. 2013. "Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman". Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## ***CURRICULUM VITAE***

### **A. Data Pribadi**



**Nama Lengkap** : A Cenrakasih Pratiwi  
**Nama Panggilan** : Cenra, Centcent  
**NIM** : 271 412 048  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Maros, 25 Januari 1995  
**Angkatan** : 2012  
**Agama** : Islam  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Status** : Mahasiswa

### **B. Pendidikan Formal**

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006

Nama Institusi : SDN No. 72 Kota Timur Kota Gorontalo

Alamat : Jl. Kutai Kota Timur Kota Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009

Nama Institusi : SMP Negeri 1 Telaga Biru

Alamat : Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012

Nama Institusi : SMA Negeri 1 Limboto

Alamat : Jl. Limboto Raya, Kabupaten Gorontalo

4. Perguruan Tinggi

Tahun : 2012-2016

Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Kota Gorontalo

### **C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop**

1. MPR Goes To Campus dalam Rangka Sosialisasi 4 Pilar Di Universitas Negeri Gorontalo, 11 Juni 2014.

2. Workshop Strategi Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Universitas Negeri Gorontalo oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2015.
3. Seminar MI (Media Indonesia) di Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, tahun 2015.
4. Sosialisasi 4 Pilar Dalam Rangkaian Kegiatan Munas-I oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Di Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi se-Indonesia)
5. Seminar Nasional “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, 2015.

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Palang Merah Indonesia SMP Negeri 1 Telaga Biru tahun 2007-2008.
2. Pratama Putri PRAMUKA SMP Negeri 1 Telaga Biru tahun 2008-2009.
3. Anggota Sanggar Seni SMA Negeri 1 Limboto tahun 2009-2010.
4. Anggota Science School Community (SSC) SMA Negeri 1 Limboto tahun 2009-2010.
5. Anggota OSIS SMA Negeri 1 Limboto tahun 2010-2011.
6. Anggota Sanggar Ajang Kreasi dan Seni (S-Aksi) Kab. Gorontalo tahun 2010-2011.
7. Wakil Ketua Pramuka SMA Negeri 1 Limboto tahun 2010-2011.
8. Anggota Green Community SMA Negeri 1 Limboto tahun 2011-2012.
9. Bendahara Dewan Kerja Ranting Kabupaten Gorontalo tahun 2011-2015.
10. Wakil Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Hukum (HMJ) tahun 2013.
11. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Hukum (HMJ) tahun 2014.

#### **E. Pengalaman Kepanitiaan**

1. Bendahara Umum Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
2. Sekertaris Umum Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014.
3. Panitia Acara Forum Debat Konstitusi Merah Maron (ForDeKonsMeRo) tahun 2014.